



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor :B-2035/FSy/PP.09/09/2024**

**Tentang
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PERIODE AGUSTUS-SEPTEMBER 2024
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- Menimbang** : Bahwa untuk menunjang kelancaran pendidikan pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, perlu ditetapkan dosen di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk membimbing skripsi mahasiswa S-1 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang perubahan STAIN Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
4. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2009 tentang Perubahan Nama Universitas Islam Negeri Malang Menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang Menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PERIODE AGUSTUS - SEPTEMBER 2024 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025 PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**
- Pertama** : Menunjuk dosen sebagaimana terlampir sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa periode Agustus - September 2024 program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Kedua** : Menugaskan kepada dosen sebagaimana terlampir untuk membimbing skripsi mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana terlampir.
- Ketiga** : Dalam hal penyempurnaan judul, pembuatan proposal dan penyelesaian skripsi, pembimbing diperkenankan merubah judul skripsi asalkan masih dalam satu tema.
- Keempat** : Apabila terjadi ketidaksesuaian bidang keilmuan dan keberatan untuk melaksanakan pembimbingan dimohon untuk mengembalikannya kepada program studi.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku selama satu semester (6 bulan) sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dengan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 26 September 2024

Tembusan Kepada Yth:

1. Para Ketua Program Studi;
2. Kepala Bagian Tata Usaha;
3. Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan
 Nomor : B-2035/FSy/PP.09/09/2024
 Tanggal : 26 September 2024
 Tentang : Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Periode Agustus - September 2024 Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

NO	NIM	NAMA	JUDUL	DOSEN PEMBIMBING
1	210203110074	Hisyam Ismoe Wardhana	GAGASAN CONSTITUTIONAL PREVIEW DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN)	Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M.
2	210203110090	Erlinda Trya Prihatini	IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PPU-XXII/2024 TERKAIT UJI MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG USIA CALON KEPALA DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
3	210203110004	Faiqotur Rizqiyah	POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2024 TERHADAP PENGATURAN CUTI MELAHIRKAN PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH	Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
4	210203110029	Muhammad Fikri Fachrian Haqi	POLITIK HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENYIARAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	Prayudi Rahmatullah, M.HI
5	210203110011	M Taufik Ade Kurniawan	ANALISIS YURIDIS TENTANG KONFLIK NORMA LEGALITAS ABORSI BERDASARKAN PASAL 122 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 DENGAN PASAL 346 KUHP PERSPEKTIF TEORI STUFENBAU	Imam Sukadi, S.H., M.H.
6	210203110066	Rizki Amalia Rahmadani	REFORMULASI TUGAS DAN WEWENANG BANK TANAH DALAM MENGATASI PENGHIMPUNAN TANAH TERLANTAR DI INDONESIA PADA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2021 TENTANG BADAN BANK TANAH BERDASARKAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH	Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
7	210203110048	Kamiliya Noer Rakhmah	ANTINOMI JUDEX JURIST ATAU JUDEX FACTIE MAHKAMAH AGUNG DALAM MELAKUKAN STRAFTOEMETING PERSPEKTIF MASLAHAH MURASALAH	Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
8	210203110044	Irma Aminullah	EVALUASI PURCELL PRINCIPLE TERHADAP SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA PERSPEKTIF SADD ADZ-DZARI'AH (Studi Putusan MA No. 23 P/HUM/2024)	Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
9	210203110030	Zakia Amilia	PENGELOLAAN TANAH PERHUTANI OLEH MASYARAKAT PERSPEKTIF MURSALAH (Studi di Dusun Ringintelu Desa Ngadirenggo Kecamatan Wingi Kabupaten Blitar)	Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
10	210203110002	Fira Ariani	PERAN PENUNTUT UMUM DALAM HAL PENGAJUAN RESTITUSI BERDASARKAN PERMA NO. 1 TAHUN 2022 PADA PUTUSAN NO. 88/PID.B/2023/PN.PSR PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA PASURUAN)	Sheila Kusuma Wardani Amnesti, S.H., M.H.

11	210203110032	Moch Viqi Nurohman	LEGALITAS RANGKAP JABATAN ANGGOTA MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEKALIGUS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH MENURUT PASAL 302 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014	Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
12	210203110052	Muhammad Rozaq Wira Utana	MASA PENCABUTAN HAK DIPILIH MANTAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYAH (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023)	Nur Jannani, S.HI., M.H.
13	210203110096	Muhammad Rifqi Maulana	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TENTANG STANDAR KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI SUNGAI PERSPEKTIF MASLAHAH	Abdul Kadir, S.HI., M.H.
14	210203110042	Aqorin Nadifatuz Zulfa	ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	Prayudi Rahmatullah, M.HI.
15	210203110057	Muhammad Rifqi Hafizh	ANALISIS BATAS USIA JEMAAH HAJI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I	Khairul Umam, M.HI.
16	210203110084	Muhammad Faris	PENGATURAN UNMANNED UNDERWATER VEHICLE (UUV) DI INDONESIA PRESPEKTIF TEORI HUKUM RESPONSIF DAN SADD AL-DZARI'AH (STUDI PERBANDINGAN DENGAN NEGARA AMERIKA SERIKAT)	Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M.
17	210203110036	Maulana Ibnu Dzulkifli	ANALISIS HUKUM MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA DAN WAKIL KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
18	18230049	Fathimah Azzahra Al.Hasni	DEMOKRASI RAHBARI (Studi antara konsep dan praktik demokrasi dalam pemilu eksekutif dan legislatif di Republik Islam Iran)	Irham Bashori Hasba, M.H., M.H.
19	210203110070	Nur Dini Rahmatika Safana	TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA PASCA BERLAKUNYA PERDA PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2022	Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.
20	210203110067	Muhammad Nur Hasan	ANALISIS YURIDIS PASAL 83A PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TERHADAP TUJUAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	Nur Jannani, S.HI., M.H.
21	210203110051	Ahmad Abdullah Al-Mas'udi	ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 52/PUU-XXII/2024 TERKAIT KETENTUAN LARANGAN KAMPANYE BAGI PEJABAT NEGARA SAAT PILKADA PERSPEKTIF SIYASAH QADHA'IYYAH	Imam Sukadi, S.H., M.H.

22	210203110021	Viona Mentari Adyawati	ANALISIS PUTUSAN TERKAIT PERSYARATAN BATAS USIA MINIMAL CALON KEPALA DAERAH PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM : (STUDI KOMPARASI PUTUSAN MK NO. 70/PUU-XXII/2024 DAN PUTUSAN MA NO. 23P/HUM/2024)	Abdul Kadir, S.HI., M.H.
23	210203110060	Arini Salsabila	STUDI KOMPARASI TANGGUNGJAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DATA SENSITIF E-COURT DI INDONESIA (PERSPEKTIF KONSTITUSI DAN SIYASAH DUSTURIYAH)	Sheila Kusuma Wardani Amnesti, s.H., M.H.
24	210203110086	Nuraida Manurung	ANALISIS PASAL 103 AYAT (4) BUTIR E PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH	Imam Sukadi, S.H., M.H

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 26 September 2024



Sudirman